

PENGADILAN AGAMA SENTANI

LAPORAN KEUANGAN

UAKPA (005.01.614770) Semester 2

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023

Jl. Raya Kemiri No.143

Kabupaten Jayapura - Papua 99352

Telp. (0967) 592354 Fax. (0967) 592354

e-mail : Admin@pa-sentani.go.id



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA SENTANI (614770)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.04
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Raya Kemiri No.143
Kabupaten Jayapura - Papua 99352
Telp. (0967) 592354 Fax. (0967) 592354
e-mail : Admin@pa-sentani.go.id**

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sentani adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sentani mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sentani. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Sentani, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Endah Prastiwi S.H
NIP. 196805191994032004

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN AGAMA SENTANI.....	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
A.4. Basis Akuntansi.....	10
A.5. Dasar Pengukuran	11
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	20
B.1. Pendapatan	20
Belanja.....	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
C.1. Persediaan	24
C. 2 Ekuitas	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	25
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	25
D.2. Beban Persediaan.....	25
D.3. Beban Barang dan Jasa.....	26
D.4. Beban Perjalanan Dinas	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	27
E.1. Ekuitas Awal	27
E.2. Defisit LO	27
E.3. Transaksi Antar Entitas	27
E.4. Ekuitas Akhir	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya	28
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	28
F.2. Pengungkapan Lain-lain	28

Daftar Tabel

Tabel 1 Rincian estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	21
Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2023 dan TA 2022	21
Tabel 3 Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dan 30 Desember .. 2022	22
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022.....	23
Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022....	23
Tabel 6 Perbandingan Persediaan Desember Juni 2023 dan 31 Desember 2022.....	25
Tabel 8 Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022.....	25
Tabel 9 Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022.....	26
Tabel 10 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022.....	26



PENGADILAN AGAMA SENTANI

Jl. Raya Kemiri No.143
Kabupaten Jayapura - Papua 99352
Telp. (0967) 592354 Fax. (0967) 592354
e-mail : Admin@pa-sentani.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sentani telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jayapura, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Endah Prastiwi S.H
NIP. 196805191994032004

RINGKASAN LAPORAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sentani Triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp847.788 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp847.788 atau mencapai 93,16 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp910.000,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.691.643.668 atau mencapai 68,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.905.684.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp21.725.910.981 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp68.660.274; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp21.657.250.707 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp187.361.595 dan Rp21.538.549.386

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp982.062 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.984.534.553 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-2.983.552.491, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp- 2.983.552.491.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp21.813.937.247, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-2.983.552.491 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 2.708.164.630 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp21.538.549.386.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SENTANI (614770)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	910.000	847.788	93,16	909.216
JUMLAH PENDAPATAN		910.000	847.788	93,16	909.216
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.435.519.000	1.526.019.828	62,66	1.948.601.441
Belanja Barang	B.2.2	1.470.165.000	1.165.623.840	79,29	1.803.960.591
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	59.890.306
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		3.905.684.000	2.691.643.668	68,92	3.812.452.338

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SENTANI (614770)
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	42.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	134.274	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	26.526.000	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		68.660.274	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	13.706.177.000	13.706.177.000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	3.261.061.605	3.241.231.605
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	6.712.050.091	6.712.050.091
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	5.147.155	5.147.155
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(4.027.205.144)	(3.640.275.944)
Aset Konsepsi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsepsi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		21.657.250.707	21.824.329.907
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		21.725.910.981	21.824.329.907
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	145.361.595	10.392.660
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-

Aplikasi Penyusunan LK dan CALK Sektor 614769 Triwulan III 2023

2

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SENTANI (614770)
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	982.062	909.216
Jumlah Pendapatan		982.062	909.216
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	1.646.521.423	1.945.722.441
Beban Persediaan	D.4	6.725.000	51.035.000
Beban Barang dan Jasa	D.5	520.171.270	877.473.432
Beban Pemeliharaan	D.6	572.276.900	815.031.554
Beban Perjalanan Dinas	D.7	54.392.010	66.240.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	184.447.950	347.952.894
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		2.984.534.553	4.103.455.321
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.983.552.491)	(4.102.546.105)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(2.983.552.491)	(4.102.546.105)
Pos Luar Biasa	D.15		
0		-	-
0		-	-
0		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(2.983.552.491)	(4.102.546.105)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SENTANI (614770)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023
EKUITAS AWAL	E.1	21.813.937.247
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(2.983.552.491)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-
Jumlah		-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.708.164.630
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(275.387.861)
EKUITAS AKHIR	E.6	21.538.549.386

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor :

90/PMMK.06/2014;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sentani

- a. Visi Pengadilan Agama Sentani adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani yang mandiri, bermartabat dalam penegakan hukum dan keadilan menuju peradilan yang Agung.”

Misi Pengadilan Agama Sentani adalah

1. Meningkatkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari keadilan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan
3. Meningkatkan kreibilitas dan transparansi badan peradilan melalui program Quick Wins Mahkamah Agung.

4. Meningkatkan Pelayanan publik dan Meja Informasi
- b. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sentani melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara
 2. Meningkatnya tertib administrasi perkara
 3. Meningkatnya kualitas SDM
 4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan
 5. Meingkatnya aksesibilitas putusan Peradilan (*acces to justice*)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik

pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.)Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.)Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.)Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.)Kewajiban Jangka Panjang

(5.)Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Sentani belum pernah melakukan revisi, adapun dilakukan revisi namun tidak mempengaruhi nilai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan pada nilai DIPA dan anggaran. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	910.000	910.000
Jumlah Pendapatan	910.000	910.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.435.519.000	2.435.519.000
Belanja Barang	1.470.165.000	1.470.165.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	3.905.684.000	3.905.684.000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp847.788

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp847.788 atau mencapai 93,16 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp910.000. Pendapatan Pengadilan Agama Sentani terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp847.788. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana Laporan Realisasi Bulan Desember 2023 merupakan Laporan Triwulan III pada Tahun 2023 sehingga data yang terkumpul masih sangat menurun di bandingkan data Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	910.000	847.788	93,16
Jumlah	910.000	847.788	93,16

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 6,76 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini dikarenakan Laporan Realisasi Bulan Desember 2023 merupakan Laporan Triwulan III pada Tahun 2023 sehingga data yang terkumpul masih sangat menurun di bandingkan data Tahun 2022. Laporan Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNB
Per 30 Desember 2023 dan 30 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	847.788	909.216	(6,76)
Jumlah	847.788	909.216	(6,76)

B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp847.788

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp847.788 dan Rp909.216. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 6,76 dari TA 2022 setoran Triwulan III tahun 2023. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Triwulan III TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	847.788	909.216	(6,76)
Jumlah	847.788	909.216	(6,76)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Perbandingan rincian PNPB Lainnya Triwulan III
Tahun 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)**

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	847.788	909.216	(6,76)
Jumlah	847.788	909.216	(6,76)

B.1.2. Belanja

Realisasi Belanja
Rp2.691.643.668

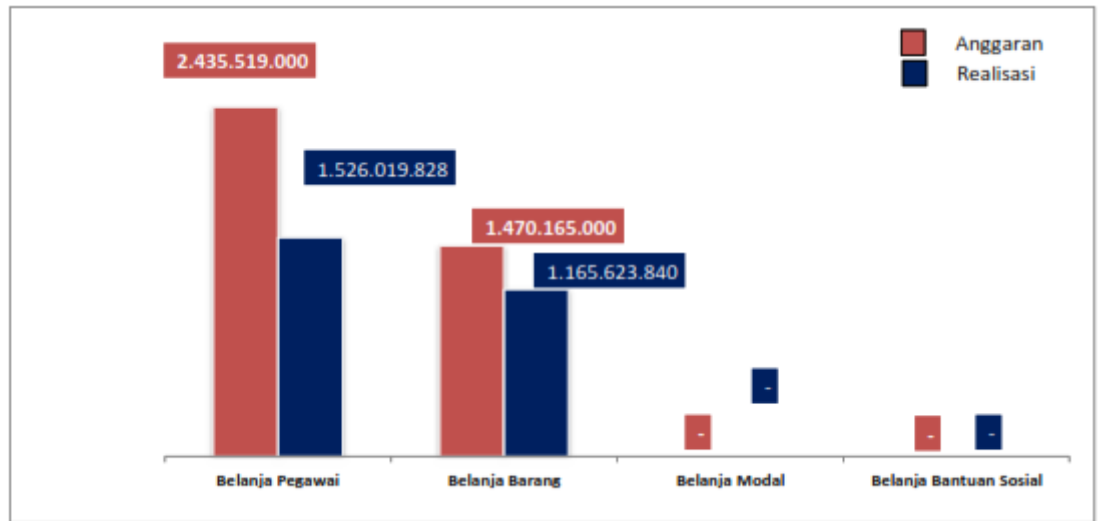
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.691.643.668 atau 68,92 % dari anggaran belanja sebesar Rp.3.905.684.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2.435.519.000	1.526.019.828	62,66
Belanja Barang	1.470.165.000	1.165.623.840	79,29
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3.905.684.000	2.691.643.668	68,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 29,40% Laporan Realisasi Bulan Juni 2023 merupakan Laporan Triwulan III pada Tahun 2023 sehingga data yang terkumpul masih sangat menurun di bandingkan data Tahun 2022. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	1.526.019.828	1.948.601.441	(21,69)
Belanja Barang	1.165.623.840	1.803.960.591	(35,39)
Belanja Modal	-	59.890.306	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2.691.643.668	3.812.452.338	(29,40)

B.1.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp1.526.019.828

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.526.019.828 dan Rp1.948.601.441. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 21,69 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi antar satker.

Tabel 1. Perbandingan Belanja Pegawai Triwulan III TA 2023 dan 2022%

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	595.910.420	819.410.840	(27,28)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.361	12.731	(18,62)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	29.797.480	47.727.990	(37,57)
Belanja Tunj. Anak PNS	12.963.948	17.273.212	(24,95)
Belanja Tunj. Struktural PNS	16.620.000	28.140.000	(40,94)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	507.870.000	555.480.000	(8,57)
Belanja Tunj. PPh PNS	72.439.363	71.733.934	0,98
Belanja Tunj. Beras PNS	32.806.260	48.448.980	(32,29)
Belanja Uang Makan PNS	90.752.000	139.919.000	(35,14)
Belanja Tunjangan Umum PNS	6.105.000	6.660.000	(8,33)
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	91.145.000	122.595.000	(25,65)
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	1.526.019.832	1.948.601.687	(21,69)
Pengembalian Belanja Pegawai	4	246	(98,37)
Jumlah Belanja	1.526.019.828	1.948.601.441	(21,69)

B.1.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang
Rp1.165.623.840

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.165.623.840 dan Rp1.803.960.591. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 35,39% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan. Rinciannya Sebagai Berikut :

Tabel 1. Perbandingan Belanja Barang Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	473.227.813	663.404.125	(28,67)
Belanja Barang Non Operasional	-	4.950.000	(100,00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33.251.000	62.622.000	(46,90)
Belanja Jasa	32.476.117	210.485.330	(84,57)
Belanja Pemeliharaan	572.276.900	796.259.136	(28,13)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	54.392.010	71.490.000	(23,92)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.165.623.840	1.809.210.591	(35,57)
Pengembalian Belanja	-	5.250.000	(100,00)
Jumlah Belanja	1.165.623.840	1.803.960.591	(35,39)

B.1.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal Rp0

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2022 disebabkan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Sentani tidak mempunyai anggaran belanja modal. Rinciannya Sebagai Berikut :

Tabel 1. Perbandingan Belanja Modal Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	29.980.306	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	29.910.000	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	59.890.306	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	59.890.306	(100,00)

B.1.2.4. Belanja Modal Peralatan Mesin

Realisasi Belanja
Modal Rp0

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2022 disebabkan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Sentani tidak mempunyai anggaran belanja modal. Rinciannya Sebagai Berikut :

Tabel 1. Perbandingan Belanja Modal Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	29.980.306	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	29.910.000	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	59.890.306	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	59.890.306	(100,00)

B.1.2.4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Rp0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2022 disebabkan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Sentani tidak mempunyai anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan. Rinciannya Sebagai Berikut :

Tabel 1. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	29.910.000	(100,00)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	29.910.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	29.910.000	(100,00)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp42.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp.42.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Triwulan III TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Giro	42.000.000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	42.000.000	-

C. 2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak Rp134.274

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp134.274 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rincian Piutang Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	134.274	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	134.274	-

Persediaan
Rp26.526.000

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp26.526.000 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Persediaan Triwulan III TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	22.691.000	-
Bahan untuk Pemeliharaan	3.835.000	-
Jumlah	26.526.000	-

Tanah
Rp13.706.177.000

C.4. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp13.706.177.000 dan Rp13.706.177.000. Nilai Tanah tersebut. Mutasi nilai Tanah tersebut tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Mutasi Tanah Triwulan III TA 2023 dan 2022

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	13.706.177.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 September 2023	13.706.177.000

C.5. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp3.261.081.605

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp3.261.081.605 dan Rp3.241.231.605. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	3.241.231.605
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 September 2023	3.241.231.605
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(2.932.346.080)
Nilai Buku per 30 September 2023	308.885.525

C.6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp8.712.050.091

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.712.050.091 dan Rp8.712.050.091. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

2023	8.712.050.091
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 September 2023	8.712.050.091
2023	(1.094.859.064)
Nilai Buku per 30 September 2023	7.617.191.027

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp5.147.155

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp5.147.155 tidak terdapat perubahan antara tahun 2022 dan 2023, dikarenakan tidak adanya mutasi aset tetap lainnya. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	5.147.155
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 September 2023	5.147.155
September 2023	-
Nilai Buku per 30 September 2023	5.147.155

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp4.027.205.144 dan Rp3.840.275.944. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.261.081.605	(2.932.346.080)	328.735.525
2	Gedung dan Bangunan	8.712.050.091	(1.094.859.064)	7.617.191.027
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	5.147.155	-	5.147.155
Akumulasi Penyusutan		11.978.278.851	(4.027.205.144)	7.951.073.707

C.9. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp42.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp42.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	42.000.000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	42.000.000

C.10. Ekuitas

Ekuitas
Rp21.538.549.386

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.538.549.386. dan Rp21.813.937.247. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Rp982.062

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp982.062 dan Rp909.216. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 8,01. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	982.062	909.216,00	8,01
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	982.062,00	909.216,00	8,01

D.2. Beban Belanja

Beban Pegawai
Rp1.646.521.423

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp1.646.521.423 dan Rp1.945.722.441.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah

yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 15,38 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian Beban Pegawai Triwulan III TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	648.776.520	819.410.840	(20,82)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.213	12.485	(10,19)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	32.270.400	47.727.990	(32,39)
Beban Tunj. Anak PNS	14.114.092	17.273.212	(18,29)
Beban Tunj. Struktural PNS	18.140.000	28.140.000	(35,54)
Beban Tunj. Fungsional PNS	552.740.000	555.480.000	(0,49)
Beban Tunj. PPh PNS	78.136.558	71.733.934	8,93
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.646.521.423	1.945.722.441	(15,38)

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp6.725.000

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp6.725.000 dan Rp51.035.000.-

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 86,82 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Rincian Beban Persediaan
per 30 Desember 2023 dan 30 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)**

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Beban Persediaan konsumsi	6.725.000	51.035.000	(86,82)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	6.725.000,00	51.035.000	(86,82)

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp520.171.270*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp520.171.270 dan Rp877.473.432.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 40,72 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9. Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)**

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Sewa	31.970.000	47.460.000	(32,64)
Beban Langganan Telepon	306.117	4.127.000	(92,58)
Beban Jasa Lainnya	200.000	400.000	(50,00)
Beban Keperluan Perkantoran	437.600.153	605.204.105	(27,69)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46.877.000	43.500.000	7,76
Beban Barang Operasional Lainnya	3.218.000	14.710.000	(78,12)
	-	-	-
Beban Langganan Listrik	-	157.122.327	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	4.950.000	(100,00)
Jumlah	520.171.270	877.473.432,00	(40,72)

Beban barang dan jasa tersebut mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan standarisasi pengguna layanan internet pendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok keseharian.

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban

Pemeliharaan

Rp572.276.900

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp572.276.900 dan Rp815.031.554.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 29,78 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	433.112.000	657.985.136	(34,18)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22.625.000	22.700.000	(0,33)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116.539.900	115.574.000	0,84
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	13.910.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	4.862.418	(100,00)
	-	#	-
	-	#	-
Jumlah	572.276.900	815.031.554	(29,78)

D.4. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp54.392.010*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp54.392.010 dan Rp66.240.000.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,89 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

**Tabel 10. Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Rincian Beban Perjalanan Dinas Triwulan III TA 2023 dan 2022			
URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	54.392.010	66.240.000	(17,89)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	54.392.010,00	66.240.000	(17,89)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.21.813.937.247,00 dan Rp.21.796.699.844,00

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp.2.983.552.491,00 dan Rp.4.102.546.105,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.708.164.630 dan Rp.4.126.837.872. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 September 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.691.643.668
Diterima dari Entitas Lain	(847.788)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	17.368.750
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	2.708.164.630

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 2.691.643.668, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 847.788.-

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.21.538.549.386,00 dan Rp.21.820.991.611,00.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2023 pada Pengadilan Agama Sentani yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK setelah tanggal Neraca Triwulan III TA 2023.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam Kegiatan Operasional PENGADILAN AGAMA SENTANI adalah :

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) No rekening 653256147701000 an. BPG 063 Pengadilan Agama Sentani yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 Rp. 0,- Persetujuan pembukaan Rekening bendahara pengeluaran pada Bank BRI Cabang Jakarta untuk menampung DIPA Badan Urusan Administrasi (01) izin dari Kementerian Keuangan Nomor : S-1102/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) No rekening 651546147701000 an. BPG 063 Pengadilan Agama Sentani yang digunakan sebagai penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 Rp. 0. Persetujuan pembukaan rekening bendahara pengeluaran pada Bank BRI Cabang Sentani untuk menampung DIPA Badan Peradilan Agama (04) izin dari Kementerian Keuangan Nomor : S-2732/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
3. Bank Syariah Indonesia (BSI) No rekening 7216355867 an. RPL 063 PS PA SENTANI UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai penampung

biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 Rp. 0. Persetujuan pembukaan rekening bendahara Penerimaan pada Bank Syariah Indonesia Unit Sentani untuk menampung Biaya Perkara, izin dari Menteri Keuangan Nomor : W25-A10/873/KU.00.01/11/2022 tanggal 24 November 2022.

F.2.3. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat ralat SPM dan SSBP caturwulan III Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Sentani.

F.2.4. Catatan Penting Lainnya

Keputusan Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran DIPA 01 (Pengadilan Agama Sentani) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) pada Pengadilan Agama Sentani Nomor W25-A7/171/KU.00.1/2/2023 Tanggal 03 Februari 2023, dan DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) Nomor W25-A7/171/KU.00.1/2/2023 Tanggal 03 Februari 2023, Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama : endah Prastiwi, S.,S.H..
NIP : 196805191994032004
Jabatan : Kuasa Penggunaan Anggaran
2. Nama : Moch. Arif iriantio, S.E..
NIP : 197811122011011004
Jabatan : PPSPM
3. Nama : Nurmin
NIP : 197911202006042002
Jabatan : Bendahara pengeluaran
4. Nama : Farindah Nurjannah, A.Md
NIP : 198106062009042006
Jabatan : Bendahara Penerimaan

5. Nama : Said Andriyan, S.T.
NIP : 198110172009091001
Jabatan : Staf Pengelola Anggaran
6. Nama : Zulfahmi Syarif, S.HI
Jabatan : PPNPN / (PPABP)
7. Nama : Emha Rizal Sanmas, S.Kom
Jabatan : PPNPN / Staf Pengelola Anggaran

